

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Heru Budi: Cek Rusun DKI Satu Per Satu

Pengecekan kelayakan rusun tak lepas dari insiden ambruknya plang nama Blok C5 Rusunawa Marunda di Jakarta Utara pada 30 Agustus 2023.

JAKARTA, KOMPAS — Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan rumah susun di Jakarta akan dicek kelayakannya demi keselamatan dan keamanan penghuni. Namun, belum dipastikan kapan pengecekan dilakukan.

Pengecekan kelayakan ini tak lepas dari insiden ambruknya plang nama Blok C5 Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, pada 30 Agustus 2023. Hal itu membuat 451 keluarga penghuni Blok C Rusunawa Marunda harus direlokasi ke Rusunawa Nagrak di Cilincing. Salah satu penyebab Blok C tidak layak huni ialah korosi struktur bangunan.

"Harus, harus dicek. Rusun dicek satu per satu," ujar Heru se usai peninjauan bedah rumah di Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/9/2023). Namun, ia belum memastikan kapan persisnya pengecekan rusun-rusun akan dimulai.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mencatat ada dua rusun tidak layak huni. Selain Rusunawa Marunda yang dibangun pada 2005, Rusun Komarudin di Jakarta Timur juga tidak layak huni. Inspeksi bangunan menunjukkan struktur bangunan rusun yang dibangun tahun 2007 itu tak layak sehingga warganya direlokasi ke Rusun PIK Penggilingan.

Pelaksana Tugas Kepala DPRKP DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum mengatakan, ketidaklayakan rusun akan dicek jika ada indikasi. Inspeksi bangunan melibatkan dinas terkait dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Jika merujuk pada dokumen Rencana Strategis DPRKP DKI Jakarta 2023-2026, ada 32 rusun sebagai aset dinas. Semua

dibangun antara 1994 dan 2017 dengan total 24.713 unit dan 20.321 unit terisi.

Disebutkan terdapat beragam masalah di sejumlah rusun. Rusunawa Jati Rawasari, Jakarta Pusat, dibelit tidak berkembangnya usaha di lantai dasar rusunawa, meteran listrik terpusat sehingga warga belum langsung membayar ke PLN, beberapa penghuni sudah tergolong mampu tetapi memilih tinggal di rusunawa, dan ada tunggakan pembayaran sewa.

Rusunawa Karang Anyar, Jakarta Pusat, sudah berusia 30 tahun. Dampaknya banyak kerusakan pada jaringan listrik, air, dan pembuangan limbah. Rusun Pinus Elok, Jakarta Timur, kekurangan anggaran penunjang operasional unit pelayanan rusun dan sumber daya manusia sehingga penanganan masalah teknis terhambat.

Rusunawa Daan Mogot, Rusunawa Tambora, Rusunawa Rawa Buaya, dan Rusun Flamboyan di Jakarta Barat punya masalah yang sama. Banyak pagar pembatas tangga dan terali berkarat dan keropos di teras hunian warga, pintu besi sampah dan beberapa pelat keropos dan hancur, serta suku cadang mesin pompa rusak.

Alat bantu kerja juga masih kurang untuk menjangkau titik perbaikan yang tinggi dan sulit, belum ada kamera pemantau, serta beton lantai atas bocor di empat rusun itu.

Di Rusun Penjarangan, Jakarta Utara, aset besar dan tersebar sehingga belum optimal dikelola. Tarif sewa sangat rendah dibandingkan dengan sewa kontrakan di sekitar rusun.

Bedah rumah

Selain rumah susun milik DKI yang sebagian bermasalah, rumah warga yang kurang ber-

untung di Jakarta juga masih banyak yang tak layak. Untuk mengatasi hal tersebut, program bedah rumah yang diinisiasi lembaga nonpemerintah terbukti membantu warga.

Selama puluhan tahun misalnya sejumlah warga mendiami rumah tidak layak huni di Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Kini rumah-rumah yang bocor itu bersalin jadi rumah tembok, berlantai keramik, dan beratap baja ringan.

Ada tujuh rumah warga yang dibedah total selama lima bulan di Pegangsaan sebagai bagian program Bebenah Kampung dari Yayasan Buddha Tzu Chi.

Kurnia (62), warga RT 012 RW 006, senang bukan main setelah menerima kunci rumahnya yang sudah selesai dibedah total kemarin. Selama rumahnya dibenahi dia dan keluarga harus mengontrak untuk sementara waktu.

"Untung dapat bantuan. Tidak sanggup renovasi sendiri. Habis bisa ratusan juta," ujar Kurnia yang bekerja sebagai tukang servis alat elektronik itu.

Rumahnya berada di permukiman padat penduduk. Akses masuk berupa gang yang hanya cukup dilewati sepeda motor.

Rumah itu terdiri atas tiga kamar dan didiami dua keluarga. Setiap keluarga terdiri atas tiga orang. Tak heran Kurnia langsung menerima tawaran bedah rumah pada awal tahun ini. Dia melengkapi syarat berupa sertifikat tanah dan dokumen kependudukan lainnya.

Nuri Lubis (40), warga RT 017 RW 007. Rumahnya seluas 29 meter persegi kini kokoh, bersih, dan sedap dipandang ketimbang sebelumnya. Nuri setiap hari berjualan gado-gado. Ia dan keluarga selama puluhan tahun berbagi ruang dengan keluarga ipar dan keponakannya.

Penataan

Pemprov DKI Jakarta mencatat ada 450 RW kumuh dari total 2.744 RW. Dari jumlah itu, 200 RW telah disentuh program penataan dan sisanya, 250 RW, akan dibenahi secara bertahap hingga 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat, 1,77 juta rumah tangga di Jakarta belum memiliki akses terhadap hunian layak dari 2,78 juta rumah tangga pada tahun 2022.

Menurut BPS, rumah dikatakan layak huni apabila luas tempat tinggal minimal 7,2 meter per kapita, memiliki akses air minum layak, dan sanitasi layak. Rumah tinggal harus memenuhi kriteria ketahanan bangunan, yaitu atap terluas berupa beton, genteng seng, kayu, atau sirap; dinding terluas berupa tembok, plesteran anyaman bambu, kawat, kayu, papan, atau batang kayu; serta lantai terluas marmer, granit, keramik, ubin, tegel, teraso, kayu, papan, semen, atau bata.

Heru Budi menegaskan, Bebenah Kampung akan diperluas. Camat, lurah, dan pengurus warga diminta mendata dan melaporkan rumah warga yang tak layak huni agar dibedah lewat program dinas atau kerja sama dengan swasta.

Beberapa lokasi lain yang jadi prioritas bedah rumah adalah RT 013 RW 008 Kelurahan Palmerah, Palmerah, Jakarta Barat; beberapa RW di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat; Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; dan Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Dalam rencana DKI 2023-2026, ditargetkan luasan kawasan kumuh berkurang menjadi 2,26 persen di 2026.

(DAN)